

LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN



LAPORAN SEMESTER I

2024

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dasar

Informasi Umum

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 01. UU Nomor 23 Tahun 2004**
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 02. PP Nomor 60 Tahun 2008**
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 03. PP Nomor 12 Tahun 2017**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 04. Permen Pan-RB Nomor 42 Tahun 2011**
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 05. Permendagri Nomor 48 Tahun 2021**
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Tahun 2022
- 06. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016**
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 07. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023**
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 08. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2023**
tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2023.



Tujuan

Penyusunan ikhtisar pelaporan

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024 ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, disamping juga untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi daerah tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP sekaligus sebagai bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah kepada gubernur, maka perlu disusun suatu Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan mekanisme pelaporan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.



Program

Pengawasan Serta Realisasi

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
		PKPT	Non PKPT
1	AUDIT KINERJA	4	-
2	AUDIT DTT	12	-
3	REVIU	38	-
4	EVALUASI	4	-
5	MONITORING	8	-
6	CONSULTING	3	-
JUMLAH		68	-



Hasil Pengawasan

AUDIT

Kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

1. AUDIT KINERJA

Periode 1 Januari s.d. Juni 2024 telah melaksanakan audit kinerja pada Sekretariat Dewan Provinsi dan Dinas Perdagangan dalam upaya menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). **Audit Kinerja** fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, audit kinerja bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi/kinerja instansi pemerintah.

No	Obrik	LHP	Temuan		Rekomendasi	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Sekretariat Dewan Prov. Kalsel	1	7	-	7	Rp.1.350.000,-
2	Dinas Kehutanan Prov. Kalsel	1	1	-	2	Rp.280.000,-
3	Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalsel	1	2	-	2	Rp.6480.000,-
4.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalsel	1	9	-	12	Rp.2.300.292,-
Subtotal Kejadian		4	13	-	15	Rp.10.420.292,-



Hasil Pengawasan

AUDIT

2. AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat, atau permintaan pimpinan Kementerian atau Lembaga Negara Non Kementerian (K/L).

Tujuan ADTT adalah memberikan simpulan (assurance) bahwa dugaan penyimpangan atau fraud yang dilaporkan pada laporan reguler, laporan masyarakat, dan permintaan pimpinan K/L, benar terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain. Hasil ADTT dapat menghasilkan rekomendasi tentang penyetoran ke kas negara, peneraan sanksi administratif, atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, Kerugian Keuangan Negara, dan fraud lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau permintaan pimpinan (K/L).

Periode 1 Januari s.d. Juni 2024 telah melaksanakan audit ketaatan, audit investigatif, audit GWPP, audit BTT, audit IT, dan audit khusus, dalam upaya menilai bahwa suatu organisasi atau perusahaan telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi. Audit ini membantu mengidentifikasi peluang perbaikan, meningkatkan langkah-langkah keamanan, dan mengurangi risiko hukum.

No	Jenis Audit	PKPT	Non-PKPT
ADTT			
1	Audit Ketaatan	1	-
2	Probity Audit	-	-
3	Audit GWPP	-	-
Khusus			
4	Audit IT	1	-
5	Audit Investigatif	5	-
6	Audit Perhitungan Kerugian Negara	1	-
7	Audit PAMJAB	1	-
Jumlah		9	-



Hasil Pengawasan

REVIU

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan reviu atas beberapa dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

No	Reviu	Wilayah
1	Reviu Ketercukupan SDM & Anggaran Irbansus	I
2	Reviu HSPK	I
3	Reviu Hibah DP3AKB dan Diapertan	I
4	Reviu Pendahuluan/Konfirmasi Pelanggaran Disiplin	I
5	Reviu PABJ Triwulan I	I
6	Reviu Ketersediaan SDM dan Anggaran Irbansus Inspektorat Daerah Kab.Hulu Sungai Utara	II
7	Reviu Ketersediaan SDM dan Anggaran Irbansus Inspektorat Daerah Kab. Balangan	II
8	Reviu Ketersediaan SDM dan Anggaran Irbansus Inspektorat Kota Banjarmasin	II
9	Reviu Ketersediaan SDM dan Anggaran Irbansus Inspektorat Daerah Kab. Tanah Bumbu	II
10	Reviu Silpa Sekolah	II
11	Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) BTT Inflasi TA. 2024	II
12	Reviu atas perhitungan Utang belanja Laboratorium Kesehatan tahun 2023	II
13	Reviu atas RKA Pergeseratn TA 2024	II
14	Reviu Atas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2023	II
15	Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2023	II
16	Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2023	II
17	Reviu atas Laporan Keuangan Bulanan SKPD Januari dan Februari 2024	II
18	Reviu atas Laporan Keuangan Bulanan SKPD Maret 2024	II
19	Reviu Data Ganda	II



Hasil Pengawasan

REVIU

No	Reviu	Wilayah
20	Reviu atas Laporan Keuangan Bulanan SKPD April 2024	II
21	Reviu SHS	II
22	Reviu Itkab	III
23	Reviu DAK	III
24	Reviu TPH	III
25	Reviu Diskominfo	III
26	Reviu Optimalisasi Pajak	III
27	Reviu DAK Fisik	III
28	Reviu SBM Kabupaten Banjar	III
29	Reviu Pelayanan Publik pada Dinas Sosial (PRSTS) Cangkal Bacari	IV
30	Reviu Pelayanan Publik pada RSUD ULIN Banjarmasin	IV
31	Reviu Pelayanan Publik Pada RSJD SAMBANG LIHUM	IV
32	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV
33	Review HPS pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Irigasi DIR Rawa Negara	Sus
34	Review HPS pada Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Baru	Sus
35	Review HPS pada Kegiatan Paket Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Antasan Tanipah Kabupaten	Sus
36	Review HPS pada Kegiatan Paket Pembangunan Jembatan Kintamani Kabupaten Tanah	Sus
37	Review HPS pada Kegiatan Paket Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa Tanggul Martapura Kabupaten Banjar	Sus
38	Review HPS pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Banjarbakula Kabupaten Barito	Sus



Hasil Pengawasan

EVALUASI

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan Evaluasi atas beberapa dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

No	Evaluasi	Wilayah
1	Evaluasi hasil pemeriksaan BPK Pada SKPD Wilayah II Inspektorat Daerah Prov. Kalsel	II
2	Evaluasi perencanaan reformasi birokrasi (Ex-ante)	IV
3	Evaluasi perencanaan reformasi birokrasi (Ex-ante) Lanjutan	IV
4	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	IV



Hasil Pengawasan

MONITORING

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan Monitoring atas beberapa dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

No	Monitoring	Wilayah
1	Monitoring P3DN Februari	I
2	Monitoring P3DN Maret	I
3	Monitoring dan Evaluasi terhadap Dana Bos SLB Negeri 1 Amuntai	II
4	Monitoring dan Evaluasi terhadap Dana Bos SMAN 2 Amuntai	II
5	Monitoring terhadap Dana Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II
6	Monitoring Pembangunan Zona Integritas pada SKPD/ Unit kerja dilingkungan pemerintah Prov. Kalsel	IV
7	Monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	IV
8	Monitoring AKIP SKPD/UPT yang diusulkan WBK/WBBM	IV



Hasil Pengawasan

CONSULTING

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan Consulting atas beberapa dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

No	Consulting	Wilayah
1	Consulting BKD	III
2	Consulting TLHP BPK TPH	III
3	Consulting TLHP BPK Biro Umum	III



Hasil Pemantauan

TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit meliputi **Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan** dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri **Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan** dan **Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**.

Adapun hasil kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



1

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

2

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

3

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalsel



Hasil Pemantauan

TINDAK LANJUT

1

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Tujuan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah daerah provinsi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemantauan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .



Nomor LHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5
1/LHP/XIX.BJM/04/2024	9	IDR 2.188.308.121,25	17	IDR 140.053.100,00

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI Semester I Tahun 2024

- Temuan : 9
- Rekomendasi : 17
- Selesai : 0
- Dalam Proses : 17
- Belum Ditindak Lanjuti : 0
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

Source : <https://eauditee.bpk.go.id>



Hasil Pemantauan

TINDAK LANJUT

2

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Menteri Dalam Negeri pada Tahun 2019 - 2023 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 - 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri oleh inspektorat provinsi adalah salah satu bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat provinsi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Itjen Kemendagri. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mencegah dan menangani potensi kerugian negara. Pemantauan ini juga bertujuan untuk memperkuat fungsi inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional, mandiri, dan berintegritas.



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Semester I Tahun 2024

NO.	PROVINSI	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS TLHP			
				S	BS	BD	TPTD
1	KALIMANTAN SELATAN	9	20	13	7	0	0
Total		9	20	13	7	0	0



Hasil Pemantauan

TINDAK LANJUT

3

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalsel

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi adalah salah satu fungsi pengawasan internal pemerintah yang bertujuan untuk menjamin bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh APIP telah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi objek pemeriksaan. Pemantauan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja SKPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara. Pemantauan ini dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis risiko.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalsel Tahun 2023

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH TEMUAN AWAL			SELESAI DITINDAK LANJUTI			SALDO TEMUAN			PROSENTASE (%) TINDAK LANJUT
		T	S	Nilai (Rp)	T	S	Nilai (Rp)	T	S	Nilai (Rp)	
1	HULU SUNGAI SELATAN	8	12		8	12					100
2	BANJAR	6	6		6	6					100
3	HULU SUNGAI TENGAH	14	20		14	20					100
4	BANJARBARU	9	9		9	9					100
5	BALANGAN	9	11		9	11					100
6	BANJARMASIN	15	24		15	24					100
7	TABALONG	9	9		9	9					100
8	BARITO KUALA	8	8		8	8					100
9	TANAH BUMBU	10	12		10	12					100
10	HULU SUNGAI UTARA	7	11		7	11					100
11	TAPIN	TIDAK DILAKUKAN AUDIT									
12	TANAH LAUT										
13	KOTABARU										
JUMLAH		95	122	-	95	122	-			0,00	100

No	UNIT KERJA	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS TLHP				Presentase Tindaklanjut (%)
				S	DP	BD	TPTD	
1	RSUD Ulin Banjarmasin	6	9	9	-	-	-	100%
2	Dinas Kesehatan	9	11	-	11	-	-	-
3	Dinas Perdagangan	8	10	10	-	-	-	100%
4	Sekretariat Dewan DPRD	5	5	5	-	-	-	100%
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	5	5	-	-	-	100%



Hasil Pemantauan

TINDAK LANJUT

3

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalsel



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalsel

Semester I Tahun 2024

No	UNIT KERJA	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS TLHP				Presentase Tindaklanjut (%)
				S	DP	BD	TPTD	
1	Dinas Kehutanan	1	2	2	-	-	-	100%
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	2	2	-	-	-	100%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	9	-	9	-	-	-
4	Badan Kepegawaian Daerah	9	12	4	8	-	-	50%



Penutup

Kesimpulan

Secara umum pencapaian hasil pengawasan dan tindaklanjut pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Semester I Tahun 2024 relatif terlaksana dengan baik dan keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait;
- Komitmen Aparat Pengawas Fungsional menyelesaikan pengawasan dan pelaporan tepat waktu;
- Komitmen objek diperiksa untuk menyelesaikan / menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan secara cepat.



Banjbaru, 29 JUNI 2024

INSPEKTUR

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.SI., M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19700202199603 1 002

